

Implementation of the Regulation of the Minister of Villages Regulation of the Minister of Disadvantaged Villages and Transmigration Number 2 of 2016 concerning the Village Development Index in the Randegan Village Development Policy

[Implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Randegan]

Safira Yuliana Putri¹⁾, Isna Fitria Agustina^{*2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. This study examines the implementation of the Minister of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Regulation Number 2 of 2016 on the Village Development Index (IDM) in Randegan Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. The purpose of this research is to analyze and describe the Implementation of the Regulation of the Minister of Villages Regulation of the Minister of Disadvantaged Villages and Transmigration Number 2 of 2016 concerning the Village Development Index in the Randegan Village Development Policy. Using a descriptive qualitative approach with the Van Meter and Van Horn policy implementation theory, this study reveals that the implementation of the IDM in Randegan Village has followed procedures, supported by the adequate capacity of village officials and coordination with village assistants. However, some challenges remain, such as the lack of data accuracy and suboptimal community participation. The research findings show that the success of this policy depends not only on the availability of resources and implementation mechanisms but also on active community involvement and the use of technology in data management and policy evaluation. Therefore, enhancing socialization, strengthening coordination among stakeholders, and optimizing information technology are recommended to support the effectiveness of the IDM implementation.

Keywords - Village Development Index, policy implementation, village development, Van Meter and Van Horn, Randegan Village.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dalam kebijakan pembangunan desa Randegan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi IDM di Desa Randegan telah berjalan sesuai prosedur, didukung oleh kapasitas aparatur desa yang memadai serta koordinasi yang cukup baik dengan pendamping desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti validitas data yang kurang akurat dan rendahnya partisipasi masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan mekanisme pelaksanaan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan optimisasi teknologi informasi direkomendasikan untuk mendukung efektivitas implementasi Indeks Desa Membangun.

Kata Kunci - Indeks Desa Membangun, implementasi kebijakan, pembangunan desa, Van Meter dan Van Horn, Desa Randegan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh beragam suku dan budaya adalah sebuah mozaik kehidupan yang terjalin di antara ribuan pulau [1] yang dibagi menjadi beberapa bagian Administratif yang Meliputi Provinsi hingga yang terkecil yaitu Desa [2] Dalam kerangka hukum, pengertian desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah, serta berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau adat istiadat Karakteristik desa mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah geografis, nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat desa [3] Dari segi interaksi sosial, kehidupan penduduk di desa memiliki interaksi sosial yang lebih baik

antar warganya. [4] Pemerintahan desa memiliki struktur dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, yang memberikan otonomi kepada desa dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan pembangunan [3] Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga pemahaman mendalam tentang desa penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan [5]

Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah sistem pengukuran yang digunakan untuk menilai dan memetakan kondisi pembangunan di tingkat desa secara komprehensif [6] IDM dirancang untuk mengidentifikasi tiga IDM yang mencakup indeks sosial, ekonomi, dan lingkungan (ekologi), sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang tentunya dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu desa [7] Indeks ketahanan sosial meliputi solidaritas, toleransi, rasa aman, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan informasi. Indeks ketahanan ekonomi berfokus pada keragaman produksi, akses perdagangan, logistik, keuangan, serta keberadaan lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Sementara itu, indeks ketahanan ekologi mencakup kualitas lingkungan, kerawanan, dan kemampuan tanggap bencana untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan masyarakat. Ketiga indeks ini memberikan gambaran holistik mengenai kesejahteraan masyarakat desa, yang membantu dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan riil desa. [3]

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), desa-desa di Indonesia diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. [3] Klasifikasi ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan di masing-masing desa dan menjadi dasar dalam menentukan prioritas alokasi Dana Desa (DD) serta program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Berdasarkan indikator IDM tahun 2021-2024 pada Gambar 1, diukur pada tahun terakhir 2024, Desa Randegan tercatat sudah memiliki status Desa Mandiri dengan nilai IDM sebesar 0,8859, yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,87 (32,9%), Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,85 (32,0%), dan Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,93 (35,1) [8] Meskipun telah mencapai status mandiri sejak tahun 2024, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan, seperti validitas data yang belum optimal, kurangnya koordinasi antarpihak, serta tantangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES.

Persentase Komponen IDM Desa Randegan

TAHUN	IKS	IKE	IKL
2021	35,3%	28,5%	35,3%
2022	33,4%	32,3%	34,3%
2023	33,9%	32,1%	34,0%
2024	32,9%	32,0%	35,1%

Gambar 1. Grafik Komponen IDM Desa Randegan 2021 – 2024

Sumber : Kementerian Desa PDTT

Peneliti melihat permasalahan pembangunan Desa Randegan, ditemukan bahwa terdapat sejumlah indikator yang menghambat kemajuan desa tersebut. Pertama, pada indeks ketahanan sosial. Desa Randegan memiliki sejumlah permasalahan kesehatan yang memengaruhi kesejahteraan warganya. Berdasarkan laporan Rumusan Pokok IDM pada website Kemendesa 2024, [8] menunjukkan bahwa Desa Randegan hanya memiliki tenaga kerja Kesehatan yang hanya terdiri dari 8 orang Dokter dan 4 orang Bidan, dengan Skor jumlah tenaga kerja kesehatan yang masih *nol*, yang idealnya harus terdapat minimal 5 orang tenaga kerja kesehatan di Desa Randegan. Kurangnya tenaga kerja kesehatan atau nakes tentunya dapat berdampak pada akses kesehatan yang rendah, dan meningkatkan resiko kesehatan masyarakat akibat rasio tenaga kesehatan yang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah warga di Desa Randegan, hal ini tentunya menjadi permasalahan penting yang dapat mempengaruhi kemajuan desa.

Kedua, indeks ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat Desa Randegan. Menurut Staff Sekretariat Desa pada wawancara dengan penulis

"Kalo disini sih, sebenarnya sudah banyak UMKM dek, Koperasinya juga malah berkembang terbaik di Tanggulangin, cuman, di Randegan ini nggak punya BUMDES, rencananya masih baru mau disusun, itu sih yang paling beda sama desa desa lain."

Desa Randegan menghadapi tantangan signifikan dalam kemajuan ekonomi akibat ketidakadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tanpa BUMDES, potensi sumber daya lokal tidak dapat dikelola secara optimal, yang mengakibatkan hilangnya peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDES berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan menyediakan berbagai layanan dan produk yang bisa memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, tanpa adanya pengelolaan yang terstruktur, masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dapat berkontribusi pada perputaran ekonomi desa. Akibatnya, ketergantungan pada sektor pertanian dan pekerjaan informal menjadi semakin tinggi, sehingga menghambat diversifikasi ekonomi dan mengurangi daya saing desa di tingkat yang lebih luas. Ketiadaan BUMDES juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga menghambat inovasi dan kolaborasi yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Meski begitu, pada Desa Randegan terdapat 260 UMKM aktif pada 2023, serta luas panen padi mencapai 129 hektar, meskipun tidak ada lahan untuk palawija atau tebu. [9] Satu KUD/Kopwan juga turut mendukung ekonomi desa. Karena itu, penguatan teknologi pertanian dan pemberdayaan UMKM menjadi kunci peningkatan kesejahteraan ekonomi di Desa Randegan.

Ketiga, permasalahan ekologi di Desa Randegan, salah satu isu utama adalah penurunan kualitas lahan pertanian akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Hal ini tidak hanya merusak kesuburan tanah tetapi juga mencemari sumber air, yang penting bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Meski telah ada inisiatif dari masyarakat terkait isu tersebut, diperlukan intervensi lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan di desa Randegan.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa dan penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman terkait efektivitas pembangunan desa. Studi Armauliza dan Sintaningrum (2018) menekankan pentingnya penggunaan *systematic review* dalam memetakan teori efektivitas pembangunan desa berbasis paradigma *goal attainment*, yang relevan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari perspektif organisasi nirlaba [10]. Selanjutnya, penelitian Muh. Fachri Arsjad dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 di Kecamatan Bulawa belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, standar kebijakan, dan tantangan sosial-politik. [11] Di sisi lain, penelitian Nurul Aulia dkk. (2023) menunjukkan keberhasilan penerapan IDM di Desa Biringala berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh teori Van Meter dan Van Horn. [12] Penelitian Fernanda dan Agustina (2024) membahas implementasi program ketahanan pangan di Desa Permisan berdasarkan teori Edwards III, namun belum menyoroti stagnasi produksi pangan secara spesifik [13]. Berdasarkan kajian ini, penelitian yang diusulkan bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis implementasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 di Desa Randegan, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan desa dalam indeks sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang hingga kini belum banyak dibahas secara mendalam pada wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn. Kajian ini akan menilai 6 pendekatan, Pertama, yaitu bagaimana standar kebijakan yang merujuk pada pedoman dan regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Standar ini menetapkan prosedur dan kriteria yang harus diikuti dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. Kedua sumber daya, dalam hal ini merujuk pada konteks bahwa sumber daya mencakup semua alat, manusia, dan dana yang diperlukan untuk mendukung implementasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan. Ketiga, komunikasi antarorganisasi, yang merujuk pada interaksi dan koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa, pendamping desa, dan dinas terkait untuk mendukung implementasi Indeks Desa Membangun (IDM). Keempat, karakteristik agen pelaksana, dimana atribut dan kemampuan individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM). Kelima, kondisi sosial-ekonomi, hal ini mengukur bagaimana situasi masyarakat di Desa Randegan yang memengaruhi pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM). Serta terakhir, disposisi pelaksana, yaitu bagaimana sikap dan komitmen aparat desa dalam melaksanakan kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM). Keenam pendekatan ini akan memberikan penilaian keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan IDM dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan akurat berdasarkan kondisi di lapangan, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap perilaku, interaksi, dan dinamika sosial dalam konteks tertentu tanpa manipulasi variable. [14] Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini mengacu pada empat kriteria *trustworthiness* menurut Lincoln dan Guba (1985), yaitu: kredibilitas, dijaga melalui triangulasi sumber dan wawancara mendalam; transferabilitas, melalui deskripsi kontekstual yang rinci; dependabilitas, dengan prosedur penelitian yang sistematis dan terdokumentasi; serta konfirmabilitas, melalui analisis berbasis data dan kutipan langsung dari informan [15] Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden yang memiliki pengetahuan tentang topik yang diteliti. [16] Informan ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan IDM, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan mengikuti tahapan analisis dari Miles dan Huberman (2014), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. [17] Untuk memahami efektivitas pelaksanaan kebijakan, penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) dalam model *A Model of the Policy Implementation Process*, yang mencakup enam variabel utama, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik [18] Kerangka ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan IDM di Desa Randegan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan deskripsi mendalam untuk memastikan pembaca memahami temuan dalam konteks lokal yang relevan [19]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan bertujuan untuk meningkatkan status desa dari kategori berkembang menjadi desa mandiri. Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada tiga dimensi utama dalam IDM, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016. Standar dan sasaran kebijakan IDM menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur desa, serta penguatan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan bertujuan untuk meningkatkan status desa dari kategori berkembang menjadi desa mandiri. Upaya ini dilakukan dengan mengacu pada tiga dimensi utama dalam IDM, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016. Standar dan sasaran kebijakan IDM menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur desa, serta penguatan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Desa Randegan telah memahami kebijakan ini dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya melalui berbagai program dan inisiatif. Berbagai langkah telah dilakukan, seperti optimalisasi alokasi dana desa, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek), serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendamping desa. Pemerintah desa juga telah menyesuaikan kebijakan lokal dengan standar IDM untuk memastikan bahwa setiap indikator dalam ketiga dimensi utama dapat terpenuhi. Fokus utama dari implementasi ini adalah penguatan potensi desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang berbasis partisipasi, sehingga pembangunan dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Hal ini telah diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

"Kami mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi, bangun infrastruktur, sama pelatihan aparatur desa, mbak. Kami juga bekerja sama dengan pendamping desa. ... Tantangan banyak, komunikasi sama koordinasi ke orang-orang (stakeholders), serta kesenjangan distribusi manfaat buat beberapa kelompok masyarakat"

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam merealisasikan sasaran kebijakan ini. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum sepenuhnya merasakan manfaat kebijakan IDM secara merata. Beberapa program yang telah dilaksanakan masih menghadapi kendala dalam hal distribusi manfaat dan pemerataan akses, terutama bagi kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan IDM, keterbatasan data yang akurat untuk pengukuran indikator, serta masih adanya hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

"Kami itu ngerasa ada perubahan, mbak, kayak perbaikan jalan sama bantuan usaha kecil, tapi tidak semua warga merasakan manfaat yang sama. Beberapa itu masih kesulitan akses bantuan karena kurangnya informasi. Ini perlu lebih banyak penyuluhan sama sosialisasi tentang IDM ya, mbak, agar semua warga paham dan dapat manfaat yang rata "

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penelitian ini menemukan adanya tantangan yang signifikan dalam merealisasikan sasaran kebijakan IDM di Desa Randegan. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum sepenuhnya merasakan manfaat kebijakan IDM secara merata. Beberapa program yang telah dilaksanakan masih menghadapi kendala dalam hal distribusi manfaat dan pemerataan akses, terutama bagi kelompok masyarakat tertentu.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan IDM sesuai dengan standar yang ditetapkan, tantangan terkait distribusi manfaat dan komunikasi antar-stakeholder masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak penyuluhan dan sosialisasi untuk memastikan bahwa seluruh warga desa memahami dan dapat merasakan manfaat dari program IDM secara merata. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam proses implementasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) sangat bergantung pada ketersediaan dan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Randegan telah berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mendukung pencapaian target IDM. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat desa.

Pemerintah desa mengklaim bahwa aparatur desa telah mendapatkan pelatihan yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan IDM, terutama melalui bimbingan teknis (BIMTEK) yang diadakan setiap tahun. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan mengimplementasikan IDM sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam pelaksanaan IDM, Pemerintah Desa Randegan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang bertugas memberikan arahan teknis serta membantu dalam penginputan dan evaluasi data. Struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini juga telah diatur dengan baik, di mana Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin utama, didampingi oleh Pendamping Lokal Desa dan KASI Kesejahteraan Desa yang bertugas sebagai admin penginput data. Dengan adanya struktur yang jelas, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih sistematis dan terarah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan pada wawancara

"Kami pernah ngasih pelatihan lewat BIMTEK tiap tahun biar aparatur lebih paham IDM. Kami juga dibantu

sama Pendamping Lokal Desa buat mengarahkan teknis sama memastikan data yang diinput sampun (sudah sesuai atau belum.)"

Namun, meskipun aparat desa telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai, masih terdapat tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memahami dan mendukung kebijakan IDM masih tergolong rendah. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat kebijakan ini menyebabkan sebagian warga kurang aktif dalam memberikan data yang akurat, sehingga mempengaruhi validitas indikator yang digunakan dalam pengukuran IDM. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat Desa Randegan pada wawancara

"Aku ga sepiro (seberapa) paham opo (apa) iku (apa itu) IDM, mbak. Beberapa warga yo kurang ngerti (tahu) opo (apa) sing kudu dilakoni (yang harus dilakukan) untuk (mendukung kebijakan) ini"

"Masyarakat iki perlu luwih (lebih) akeh (banyak) informasi ben isok (biar bisa) berpartisipasi (dalam program ini)"

Dalam aspek finansial, Pemerintah Desa Randegan telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung berbagai program yang berbasis pada indikator IDM. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi desa guna meningkatkan skor IDM. Selain itu, pemerintah desa juga diberikan fleksibilitas dalam mengembangkan dan mengakumulasi indeks IDM, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Meskipun pendanaan telah dialokasikan, tantangan dalam pemanfaatan anggaran masih ditemukan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran, mengingat terdapat banyak aspek pembangunan desa yang perlu diperbaiki secara bersamaan. Selain itu, efektivitas pemanfaatan dana desa juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap data yang valid, yang dapat berdampak pada akurasi penganggaran dan evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan berbasis data agar alokasi dana dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Desa Randegan pada wawancara.

"Dana Desa kami alokasikan buat program yang mendukung IDM. Namun, tetep ada kesulitan dalam nentukan prioritas alokasi dana karena banyak kebutuhan yang harus kami penuhi, mbak Kami butuh data yang akurat buat memastikan anggaran ini digunakan secara efisien"

Dalam hal infrastruktur, Desa Randegan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak memperoleh status desa mandiri. Salah satu indikator keberhasilan yang terlihat adalah perbaikan infrastruktur jalan, yang berkontribusi pada peningkatan mobilitas masyarakat dan akses terhadap fasilitas umum. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan ekonomi lokal, seperti pasar desa dan pusat kegiatan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Pendamping Lokal Desa dalam wawancara

"Beberapa aparat (desa) masih kesulitan dalam menggunakan sistem IT, mbak. Ini yang buat lambat waktu input data. Beberapa warga juga ada yang masih ndak punya hp, jadi susah buat akses informasi"

Penelitian ini juga mengaitkan temuan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) tentang A Model of the Policy Implementation Process. Dalam konteks Desa Randegan, sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan implementasi IDM. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan kesulitan dalam prioritas alokasi anggaran menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IDM sangat bergantung pada peningkatan koordinasi antar stakeholder serta akses data yang lebih akurat.

Hasil dari temuan ini adalah bahwa meskipun Pemerintah Desa Randegan telah melakukan berbagai upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal partisipasi masyarakat, keterbatasan data yang akurat, dan akses terhadap teknologi informasi. Untuk memastikan implementasi IDM yang

lebih efektif, dibutuhkan peningkatan strategi sosialisasi, transparansi pengelolaan keuangan, dan pendekatan berbasis data yang lebih baik agar anggaran dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, dalam hal ini pemerintah desa beserta perangkat pendukungnya. Struktur organisasi yang baik, mekanisme kerja yang jelas, serta koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjalankan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Randegan telah memiliki organisasi pelaksana yang cukup terstruktur, namun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasi IDM berjalan lebih optimal. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

"Struktur sudah ada dan terorganisasi. Saya sebagai Kepala Desa dibantu pendamping dan KASI Kesejahteraan. Tapi kadang koordinasi antar bagian belum maksimal."

Pemerintah Desa Randegan memiliki struktur organisasi yang telah terorganisir dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan IDM. Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin utama yang mengawasi jalannya implementasi kebijakan, didampingi oleh Pendamping Lokal Desa yang bertugas memberikan arahan teknis dan memastikan kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, Kasi Kesejahteraan Desa bertanggung jawab dalam proses penginputan data IDM, yang menjadi dasar dalam penentuan status desa. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas ini, proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih sistematis dan terarah. Hal ini diungkapkan oleh Pendamping Lokal Desa dalam wawancara

"Saya mendampingi dalam teknis pelaksanaan, termasuk memastikan data masuk sesuai dengan indikator IDM."

Namun, meskipun struktur organisasi telah terbentuk dengan baik, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar pemangku kepentingan. Beberapa perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam menyinkronkan data yang diperoleh dari masyarakat dengan standar yang ditetapkan oleh IDM. Selain itu, keterbatasan komunikasi antara pemerintah desa dan dinas terkait menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaporan dan evaluasi program. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan mekanisme komunikasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan IDM. Hal ini diungkapkan oleh KASI Kesejahteraan Desa Randegan dalam wawancara

"Kadang data dari warga tidak sinkron dengan indikator di sistem, jadi kami perlu waktu untuk validasi ulang."

Dalam menjalankan kebijakan IDM, Pemerintah Desa Randegan telah memiliki prosedur yang cukup jelas, yang mencakup pengumpulan data, penginputan ke dalam sistem, serta evaluasi hasil untuk menentukan langkah tindak lanjut. Setiap tahun, aparat desa bersama dengan pendamping desa melakukan pemutakhiran data IDM untuk mengukur perkembangan desa berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam aspek validitas data. Beberapa data yang diperoleh dari masyarakat sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi memengaruhi hasil pengukuran IDM. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya data yang valid juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan data yang akurat dan mendukung keberhasilan program IDM. Hal ini diungkapkan oleh Masyarakat Desa Randegan dalam wawancara

"Kami itu sering diminta data, tapi gak semua warga tahu harus isi apa atau sepenting data itu."

Salah satu aspek penting dalam implementasi IDM adalah penguatan ekonomi desa, yang sebagian besar didukung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Di Desa Randegan, BUMDES telah dibentuk dan memiliki beberapa sub-

unit usaha yang bergerak di berbagai sektor, seperti perdagangan dan jasa. Keberadaan BUMDES bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES di Desa Randegan masih mengalami kendala dalam kepengurusan dan manajemen usaha. Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama adalah kurangnya kapasitas pengelola dalam mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDES. Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif menyebabkan sulitnya mengukur dampak program BUMDES terhadap perekonomian desa. Hal ini diungkapkan oleh Pengurus BUMDES randegan dalam wawancara

"Kami punya beberapa unit usaha, tapi pengelola masih butuh pelatihan dan kami kesulitan dapat tambahan modal."

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDES, baik dalam hal manajemen usaha maupun dalam mencari peluang pendanaan. Pelatihan bisnis, pendampingan teknis, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perbankan dan lembaga pendanaan mikro dapat menjadi solusi untuk memperkuat peran BUMDES sebagai penggerak utama perekonomian desa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

"Kami sedang mencoba cari pelatihan dan kerja sama agar BUMDES bisa berkembang lebih baik dan mandiri."

Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik organisasi pelaksana memegang peran penting dalam efektivitas kebijakan. Pembagian tugas yang jelas, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun Pemerintah Desa Randegan telah memiliki struktur organisasi yang baik dan prosedur yang jelas, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal validitas data, koordinasi antar-pihak terkait, dan penguatan peran BUMDES. Untuk itu, peningkatan kapasitas bagi aparatur desa agar lebih adaptif dalam menerapkan kebijakan IDM menjadi hal yang penting. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan evaluasi program juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan IDM di Desa Randegan.

Hasil dari temuan ini adalah bahwa meskipun struktur organisasi dan prosedur pelaksanaan telah terbentuk dengan baik, tantangan dalam koordinasi, validitas data, dan pengelolaan BUMDES perlu segera diatasi agar implementasi IDM dapat berjalan lebih efektif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan IDM secara optimal di Desa Randegan.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Koordinasi dan komunikasi yang efektif antarorganisasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan. Kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, pendamping desa, dan dinas terkait, yang masing-masing memiliki peran dalam memastikan keberlanjutan program. Komunikasi yang lancar akan mempermudah penyampaian informasi, sinkronisasi data, serta pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara pemerintah desa, pendamping desa, dan dinas terkait dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) dan aplikasi berbasis digital. Forum Musrenbang menjadi wadah diskusi dan evaluasi kebijakan, sedangkan aplikasi digital digunakan untuk mempercepat proses komunikasi dan pelaporan data. Namun, meskipun teknologi telah diterapkan, masih ditemukan kendala seperti kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dalam menggunakan sistem ini serta keterbatasan infrastruktur internet. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

"Kami pakai sistem online juga untuk laporan IDM, tapi memang beberapa perangkat desa belum terbiasa, jadi kadang agak lambat inputnya."

Diumbuhi oleh pernyataan Aparat Desa Randegan dalam wawancara

"Kalau Musrenbang, kami rutin adakan tiap tahun. Tapi kendalanya ya itu, sinyal dan perangkat kadang nggak mendukung saat harus input data secara online."

Selain komunikasi antarorganisasi, koordinasi dengan stakeholder desa juga menjadi bagian penting dalam implementasi IDM. Pemerintah desa telah berupaya berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMDES, dan kelompok masyarakat sebelum melakukan penginputan data IDM. Namun, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman beberapa organisasi desa tentang pentingnya data IDM serta perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan stakeholder terkait mengenai prioritas pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas bagi stakeholder desa dalam memahami kebijakan IDM perlu dilakukan agar koordinasi lebih efektif. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

"Kami sudah ajak BPD dan pengurus BUMDES diskusi soal IDM, tapi memang belum semua paham pentingnya data ini. Kadang mereka masih fokus di program masing-masing." Diimbuh oleh pernyataan BPD Randegan dalam wawancara

"Kami sebenarnya ingin terlibat lebih jauh, tapi masih butuh pemahaman teknis soal IDM. Selama ini baru sebatas diskusi saat musyawarah saja."

Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam implementasi IDM, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat antara lain kurangnya pemahaman mengenai kebijakan IDM, minimnya akses informasi, serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan. Banyak warga yang belum memahami tujuan dan manfaat IDM bagi pembangunan desa, sementara akses terhadap informasi masih terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perangkat teknologi atau berada di daerah dengan konektivitas terbatas. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengadopsi strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif melalui berbagai media, serta memperkuat peran tokoh masyarakat dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Hal ini diungkapkan oleh Masyarakat Desa Randegan dalam wawancara

"Saya kurang pahamapa itu IDM, yang penting desa ada pembangunan. Kalau soal data, biasanya yang ngurus perangkat desa."

Warga lainnya pun mengungkapkan hal yang sama dalam wawancara

"Orang-orang (warga) juga belum paham sepenuhnya soal IDM, jadi kadang cuek kalau diminta data. Harusnya ada pendekatan lebih ke warga."

Keterlibatan masyarakat yang rendah ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengadopsi strategi sosialisasi yang lebih intensif melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, pengeras suara, dan distribusi informasi melalui perangkat yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, peran tokoh masyarakat harus diperkuat untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga, agar dapat mengedukasi mereka mengenai pentingnya IDM dalam konteks pembangunan desa.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif antara organisasi pelaksana dan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu kebijakan. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, setiap pihak akan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan, prosedur implementasi, serta peran yang harus dijalankan. Dalam konteks implementasi IDM di Desa Randegan, meskipun telah tersedia forum komunikasi dan mekanisme koordinasi, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang rendah. Oleh karena itu, beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dalam implementasi IDM adalah meningkatkan sistem koordinasi antarorganisasi, memperkuat kapasitas stakeholder desa, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam komunikasi kebijakan. Dengan peningkatan dalam komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan implementasi IDM di Desa Randegan dapat berjalan lebih efektif, sehingga tujuan pembangunan desa mandiri dapat tercapai sesuai harapan.

Disposition atau Sikap Para Pelaksana

Disposition atau sikap pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan. Faktor ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan berbasis IDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan ini, dengan berupaya mencapai hasil yang optimal melalui kerja sama antar pemangku kepentingan. Namun, meskipun pemerintah desa telah menunjukkan komitmen yang kuat, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah akurasi data masyarakat yang kurang valid, yang berdampak pada ketidaktepatan dalam pengukuran indikator IDM. Selain itu, kesenjangan digital serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan IDM juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini diungkapkan oleh Aparat Desa Randegan pada wawancara

“Kami di desa sudah berkomitmen untuk menjalankan IDM sebaik mungkin, tapi memang kadang datanya dari masyarakat nggak lengkap atau tidak sesuai kenyataan.”

Senada dengan itu, Pendamping Desa juga menyampaikan

“Kendala utama itu soal data. Banyak yang belum valid, atau masyarakat belum paham pentingnya data yang akurat untuk IDM.”

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya dengan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya IDM serta bagaimana kebijakan ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan desa mereka. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti pertemuan desa, penyuluhan langsung, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak warga. Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi atau tingkat literasi yang rendah. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Desa Randegan dalam wawancara

“Kami terus sosialisasi ke warga, bahkan lewat grup WhatsApp RT. Tapi memang nggak semua warga bisa akses atau paham isi pesannya.”

Seorang warga juga menyampaikan pengalamannya

“Saya pernah denger soal IDM pas kumpulan RT, tapi nggak terlalu ngerti maksudnya. Cuma tahu itu buat lihat kemajuan desa.”

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Ketika para pelaksana memiliki pemahaman yang baik, sikap positif, serta dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan yang diimplementasikan, maka peluang keberhasilan kebijakan tersebut akan semakin besar. Dalam konteks implementasi IDM di Desa Randegan, meskipun aparat desa telah memiliki komitmen yang kuat, keberhasilan implementasi tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pendamping desa dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat agar kebijakan IDM dapat diimplementasikan dengan lebih optimal. Selain itu, pemerintah desa perlu terus mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti dengan memperkuat mekanisme validasi data, meningkatkan literasi digital, serta memperluas jangkauan sosialisasi agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi IDM di Desa Randegan dapat berjalan lebih efisien dan berkontribusi terhadap pencapaian status desa mandiri sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pendamping Desa menyatakan

“Kalau semua pihak bisa saling bantu, mulai dari perangkat, pendamping, sampai warga, pasti implementasi IDM lebih lancar. Tapi memang butuh waktu untuk membangun sinergi itu.”

Perangkat desa lainnya juga menambahkan

“Kami butuh pelatihan lagi, terutama soal digitalisasi data IDM, supaya bisa kerja lebih efisien dan tepat waktu.”

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun komitmen aparat desa terhadap implementasi IDM sudah tinggi, keberhasilan program tetap bergantung pada peningkatan kapasitas teknis, khususnya dalam digitalisasi data, serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan yang mencakup pelatihan berkala bagi pelaksana kebijakan, peningkatan literasi masyarakat mengenai IDM, serta penyempurnaan mekanisme sosialisasi agar lebih mudah dipahami dan menjangkau seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan kebijakan IDM di Desa Randegan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa mandiri.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan. Faktor-faktor eksternal ini dapat menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan dengan efektif serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat desa. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan IDM karena dianggap dapat membawa perubahan positif bagi desa. Hal ini diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Randegan saat wawancara

“Program IDM ini bagus, kami merasa desa makin maju. Tapi masih banyak warga yang belum tahu detailnya, jadi kadang mereka bingung diminta data atau ikut kegiatan.”

Namun, meskipun dukungan ini cukup besar, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan IDM. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan data dan evaluasi pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan secara pasif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mendukung implementasinya.

Dari aspek ekonomi, Desa Randegan mengalami perubahan yang signifikan setelah mencapai status Desa Mandiri. Sebelum status ini diperoleh, kondisi ekonomi masyarakat masih tergolong lemah, dengan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama yang sering menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam pemasaran hasil panen dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Seorang warga yang berprofesi sebagai petani menyampaikan

“Dulu hasil panen kadang nggak laku karena nggak ada yang bantu pemasaran. Sekarang sudah lebih baik karena ada program desa yang bantu jual produk.”

Namun, setelah menjadi Desa Mandiri, peningkatan ekonomi mulai terlihat, didukung oleh adanya program pengembangan usaha desa serta pemanfaatan dana desa untuk memperkuat sektor ekonomi lokal. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa kebijakan IDM tidak hanya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan desa secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun terjadi peningkatan ekonomi, tantangan tetap ada, seperti bagaimana memastikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi desa serta mendorong diversifikasi sumber pendapatan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Kepala Desa Randegan menegaskan dalam wawancara

“Kami ingin masyarakat nggak Cuma tergantung sama tani. Sekarang sudah ada pelatihan UMKM, tapi memang perlu waktu untuk mereka terbiasa.”

Sementara itu, dari sisi politik, penelitian ini tidak menemukan adanya faktor politik yang secara langsung memengaruhi implementasi kebijakan IDM di Desa Randegan. Tidak adanya hambatan politik dalam pelaksanaan kebijakan ini memberikan keuntungan tersendiri, karena memungkinkan pemerintah desa untuk lebih fokus dalam menjalankan program pembangunan tanpa adanya intervensi yang dapat menghambat proses implementasi. Stabilitas politik di tingkat desa juga menjadi faktor pendukung yang penting dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu anggota BPD

“Selama ini nggak ada konflik politik yang ganggu program IDM. Kami semua sepakat bantu pemerintah desa biar program berjalan lancar.”

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, faktor sosial, ekonomi, dan politik sebagai bagian dari lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Desa Randegan, dibutuhkan strategi adaptif untuk merespons dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Pemerintah desa perlu memperkuat sosialisasi kebijakan guna meningkatkan pemahaman masyarakat, mengembangkan program ekonomi berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan stabilitas politik desa agar implementasi IDM berjalan lancar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IDM di Desa Randegan ditopang oleh dukungan sosial yang tinggi, kemajuan ekonomi pasca status Desa Mandiri, dan kondisi politik yang stabil. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan ketergantungan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, strategi ke depan harus lebih responsif, melalui perluasan sosialisasi, inovasi pemberdayaan ekonomi, dan penguatan komunikasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, implementasi IDM diharapkan semakin optimal dan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan sesuai tujuan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan. Berdasarkan penelitian ini, implementasi Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Randegan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, didukung oleh kapasitas aparatur desa yang memadai serta koordinasi dengan pendamping desa. Namun, masih terdapat tantangan dalam validitas data serta partisipasi masyarakat yang belum optimal, yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan dalam mendorong pembangunan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi IDM tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan mekanisme pelaksanaan, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat serta adaptasi teknologi dalam pengelolaan data dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji strategi peningkatan kesadaran masyarakat serta pemanfaatan sistem digital dalam mendukung transparansi dan efisiensi implementasi kebijakan pembangunan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Randegan, khususnya Kepala Desa dan aparat desa, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan pihak kampus atas bimbingan dan dukungannya selama proses penelitian dan penulisan manuskrip ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan desa di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] N. Akhmad and I. Rini, *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin, 2020. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=wUDYDwAAQBAJ>
- [2] C. Permadi, “Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,” *Welf. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 184–189, 2023, doi: 10.30762/welfare.v1i1.410.
- [3] UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.,” no. 1, 2014.
- [4] D. Ventriglio, A., Torales, J., Castaldelli-Maia, J. M., De Berardis, D., & Bhugra, *Urbanization and Emerging Mental Health Issues*, 26(1). CNS Spectrums, 2021. doi: 10.1017/S1092852920001236.
- [5] R. A. Anasi, S. Bumulo, and R. Mobilingo, “Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo,” *J. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. c, pp. 91–100, 2024.
- [6] Kementerian Desa, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,” *Jakarta*, pp. 1–65, 2016, [Online]. Available: http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016

- [7] A. Elfahdi, Y. Mardyani, Y. Sasmito, and R. Budiati, “Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung Timur,” *Kamikawa J. Perenc. Pembang. dan Inov.*, vol. 1, no. 1, pp. 36–52, 2021.
- [8] Kementerian Desa PDTT, “Hasil Rekomendasi IDM.” [Online]. Available: idm.kemendesa.go.id/rekomendasi
- [9] B. K. Tanggulangin, “Kecamatan Tanggulangin Dalam Angka 2024,” pp. 1–98, 2024.
- [10] A. Septiawan, “Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna,” *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) Kaji. Ilmu Pemerintah. dan Polit. Drh.*, vol. 3, no. 2, pp. 149–170, 2018, doi: 10.24905/jip.3.2.2018.149-170.
- [11] M. F. Arsjad, M. Syukran, S. Tabo, A. Biongan, and M. S. Nuna, “Implementasi PERMENDES PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 1, pp. 153–164, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing>
- [12] N. Aulia, M. Madani, and N. Tahir, “Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa,” *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 4, no. 4, pp. 831–844, 2023, doi: 10.26618/kimap.v4i4.12038.
- [13] D. I. Desa, P. Kecamatan, and A. J. Fernanda, “Pendahuluan,” 2025.
- [14] Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, “Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode,” 1982.
- [15] R. Miller and J. Brewer, “Naturalistic Inquiry,” *A-Z Soc. Res.*, no. June, pp. 1–3, 2015, doi: 10.4135/9781412986281.n232.
- [16] M. R. Islam, N. A. Khan, and R. Baikady, “Principles of Social Research Methodology,” *Princ. Soc. Res. Methodol.*, no. October, pp. 1–508, 2022, doi: 10.1007/978-981-19-5441-2.
- [17] S. P. Collins *et al.*, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications., 2021.
- [18] V. Meter, V & Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.,” Administration & Society.
- [19] J. D. Creswell, J. W., & Creswell, *Writing center talk over time: A mixed-method study*. 2018. doi: 10.4324/9780429469237.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.